

peringkat kedua setelah Partai Demokrat namun perolehan suara PDI Perjuangan tetap bisa dikategorikan sempurna. Hal ini tak jauh berbeda dengan pemilihan umum pada tahun 2014.

Pada tahun 2014 PDI Perjuangan justru mendapat peringkat pertama mengalahkan Partai Demokrat. Sebagai partai besar kemenangan PDI Perjuangan nilai unggul pada pemilihan legislatif tersebut. Selain pelaksanaan pemilihan legislatif, hal yang menarik dibahas ialah pemilihan walikota Surabaya pada tahun 2015. PDI Perjuangan kembali mengusung Tri Risma Harini sebagai calon kandidat walikota.

Namun, hal yang dibahas oleh peneliti ialah calon kandidat yang diusung oleh PDI Perjuangan. Tri Risma Harini merupakan *incumbent* yang kembali diusung PDI Perjuangan. Sebelumnya Risma merupakan birokrat cemerlang yang berada pada pemerintahan Kota Surabaya. Risma menjabat di bina program, ide yang diciptakan tentang perizinan lelang mendapat respon positif. Implementasi dari sistem online Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dirasa memberikan perkembangan yang baik untuk Surabaya.

Risma diberi kewenangan di Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP). Pada posisi ini Risma kembali memberi usulan untuk membuat taman. Gerakan yang diciptakan Risma pada saat menjabat ialah *Green and Clean* yang tidak hanya menjadikan Surabaya hijau tetapi bersih. Program tersebut memberikan manfaat, terbukti dengan keterlibatan

perusahaan. Selanjutnya Risma diberi amanah sebagai Kepala Badan Perencanaan Kota Surabaya (Bappeko).

Pada pencalonan Risma sebagai calon walikota Surabaya tahun 2015, tidak dapat lepas saat periode kepemimpinan pertama yaitu tahun 2010. Pada waktu Risma menjabat, terdapat ketimpangan antara Risma dengan PDI Perjuangan. Risma sempat membuat PDI Perjuangan yang notabenehnya ialah pengusung sendiri merasa kecewa. Konflik muncul disebabkan oleh kebijakan Risma yang mengeluarkan Peraturan Walikota No. 56 Tahun 2010 Tentang kenaikan Pajak Reklame. Kebijakan tersebut didasari pada tujuan untuk menata Kota Surabaya.

Konflik di PDI Perjuangan dipicu pernyataannya yang mengatakan bahwa Risma menjadi walikota karena dipilih rakyat langsung, bukan karena PDI Perjuangan. Hal tersebut membuat ribuan simpatisan dan kader PDI Perjuangan sempat melakukan aksi untuk menurunkan Risma pada bulan Januari 2011. Pada tahun 2010 Risma juga dianggap kurang berkontribusi terhadap partai yang telah membesarkan namanya serta mengantarkannya sebagai Walikota Surabaya. Akan tetapi konflik tersebut bisa diakhiri karena kompromi di internal PDI Perjuangan dan Ketua DPRD Surabaya untuk menata Surabaya melalui gebrakan untuk masyarakat kecil.

Sebelum penetapan Risma sebagai calon walikota Surabaya tahun 2015, Risma dan PDI Perjuangan berkonflik kembali. Konflik tersebut diakibatkan karena Risma dianggap sulit untuk diajak berkompromi

dengan PDI Perjuangan. Namun, pada kenyataannya penetapan calon Walikota Surabaya 2015, justru PDI Perjuangan kembali mengusung Risma untuk maju. Bahkan kader dari PDI Perjuangan sendiri yaitu Wisnu Sakti Buana justru dijadikan sebagai wakilnya. PDI Perjuangan pasti memiliki alasan untuk mengusung Risma kembali. Jika dilihat selama periode sebelumnya saat menjabat sebagai walikota Surabaya, Risma menunjukkan kemajuan positif di Kota Surabaya.

Namun, pihak DPC PDI Perjuangan Surabaya membenarkan jika pihaknya tidak mengusung Risma, melainkan menunggu Risma memperoleh KTA PDI Perjuangan. Sebab pada peraturan calon walikota tahun 2015, instruksi dari DPP harus dari kader sendiri. Sambil menunggu proses pembuatan KTA selesai, DPC PDI Perjuangan mengenalkan Wisnu sebagai wakil walikota dan sekaligus kader PDI Perjuangan.

Fenomena di atas menjadi menarik untuk diteliti sebab PDI Perjuangan ternyata mengusung Risma untuk maju sebagai calon walikota. Sedangkan Wisnu yang merupakan kader dari PDI Perjuangan berada di posisi sebagai calon wakil walikota mendampingi Risma. Hal ini kemungkinan bisa memunculkan faksionalisme yang ada di internal partai atau simpatisan dari PDI Perjuangan. Sebab kemunculan Risma bisa saja tidak mendapat persetujuan dari seluruh anggotanya. Dari uraian latar belakang di atas maka penelitian berjudul "Rekrutmen Non Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dalam Pemilihan Walikota Surabaya Tahun 2015".

1. Mandala, berjudul *Rekrutmen Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh Partai Politik Pada Pilkada di Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung Tahun 2015 (Studi Perbandingan pada DPC Partai Gerindra dan DPC PKB Kabupaten Pesawaran)*. Penelitian ini dalam rangka melaksanakan program akhir Magister Ilmu Pemerintahan Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung Tahun 2016.² Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui sistem rekrutmen, seleksi rekrutmen politik, model penetapan pasangan calon kepala daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, sumber informan dalam penelitian ini adalah ketua partai, anggota tim seleksi calon kepala daerah dari kedua partai politik. Hasil evaluasi yang diperoleh dari penelitian ini ialah, bahwa peneliti melakukan riset tentang proses rekrutmen calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dari Partai Gerindra dan PKB pada pilkada Kabupaten Pesawaran tahun 2015. Penelitian ini menjelaskan bahwa sistem rekrutmen yang dilakukan Partai Gerindra dan PKB menggunakan sistem terbuka. Hal yang menjadi latar belakang terjadinya sistem rekrutmen terbuka ialah fenomena partai politik yang tidak mampu untuk mengusung calon sendiri dari partainya sehingga partai politik berkoalisi dengan partai politik lain agar bisa mengusung calon.

²Mandala, "Rekrutmen Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh Partai Politik Pada Pilkada di Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung Tahun 2015 (Studi Perbandingan pada DPC Partai Gerindra dan DPC PKB Kabupaten Pesawaran)" (Skripsi tidak diterbitkan, Ilmu Pemerintahan Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, 2016), (Selasa, 14 Pebruari 2017, 19:12)

2. Novatus Dono, penelitiannya berjudul *Proses Rekrutmen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam Memilih Kader Politik di Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Bengkayang*. Penelitian ini dalam rangka melaksanakan program akhir Program Studi Ilmu Politik Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2016.³ Skripsi ini bertujuan untuk mendeskripsikan faktor mekanisme proses rekrutmen secara terbuka dan tertutup Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam memilih kader politik di DPC pada pemilihan legislatif di Kabupaten Bengkayang Tahun 2014. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif deskriptif. Hasil evaluasi yang diperoleh dari penelitian ini ialah calon legislatif mendapatkan penugasan di antaranya ialah sosialisasi, penggalangan dan pemetaan politik di daerah pemilihan yang bersangkutan. Melalui proses perekrutan ini bahwa penetapan calon anggota legislatif tahun 2014 masih bersifat tertutup karena masih terdapat oligarki. Hal ini masih dibuktikan dengan calon legislatif yang masih didominasi internal partai dari 30 (tiga puluh) calon diusulkan dari 4 (empat) Dapil di Kabupaten Bengkayang.
3. Muhammad Sopian, penelitiannya berjudul *Rekrutmen Calon Anggota DPRD Kota Tanjungpinang Tahun 2014 (Studi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)*. Penelitian ini dalam rangka melaksanakan

³Novatus Dono, "Proses Rekrutmen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam Memilih Kader Politik di Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten Bengkayang" (Skripsi ini tidak diterbitkan, Program Studi Ilmu Politik Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak, 2016), (Selasa, 14 Pebruari 2017, 19:40)

tugas akhir Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang 2016.⁴ Dalam penelitian ini lokasi penelitian yang dipilih adalah Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau. Objek penelitian adalah Kader Politik DPC Partai PDI Perjuangan Kota Tanjungpinang dan calon-calon anggota legislatifnya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Hasil evaluasi dari riset ini adalah pengukuran dari pelaksanaan rekrutmen politik dalam pencalonan anggota DPRD Kota Tanjungpinang oleh DPD PDIP Kota Tanjungpinang pada pemilihan umum Tahun 2014 mencakup beberapa indikator. Antara lain yaitu model rekrutmen, sumber perekrutan dan cara seleksi. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Tanjungpinang dalam menetapkan calon legislatif lebih dominan menggunakan tipe kecenderungan partisan. Pada rekrutmen yang dilakukan oleh PDIP Kota Tanjungpinang menggunakan sifat rekrutmen terbuka atau sumber perekrutan internal dan eksternal.

4. Kaswan Try Poetra, *Perbandingan Rekrutmen PDI-Perjuangan dan Partai Demokrat Terhadap Caleg DPRD Pemilu Tahun 2014 di Kabupaten Polewali Mandar*, merupakan mahasiswa Jurusan Politik

⁴Muhammad Sopian, "Rekrutmen Calon Anggota DPRD Kota Tanjungpinang Tahun 2014 (Studi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)" (Skripsi tidak diterbitkan, Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang, 2016), (Selasa, 14 Pebruari 2017, 19:53)

dan Pemerintahan Universitas Hasanuddin Makassar 2013.⁵ Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan mencari hubungan-hubungan baru yang terdapat pada suatu masalah yang luas dengan mengumpulkan data sebanyak-banyaknya dengan cara menggali informasi dari sebuah masalah, dalam hal ini membandingkan pola rekrutmen PDI-Perjuangan dan Partai Demokrat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan pola rekrutmen PDIP dan Partai Demokrat terhadap caleg DPRD pemilu tahun 2014 di Kabupaten Polewali Mandar hampir sama, di mana pola rekrutmen yang diterapkan kedua partai ini dimulai dari pendaftaran bakal calon legislatif, Seleksi tahap I (Seleksi Berkas) dan Seleksi tahap II yang dilakukan oleh DPP masing-masing partai. Dalam merekrut caleg, PDI-Perjuangan dan Partai Demokrat juga lebih memprioritaskan kader internal partainya namun tidak menutup kemungkinan PDI-Perjuangan dan Partai Demokrat untuk merekrut caleg dari pihak eksternal partai.

Berdasarkan penelusuran yang ada, ditemukan beberapa hasil dari masing-masing penelitian. Penelitian yang sudah ada membahas tentang rekrutmen dari partai politik. Mulai dari perekrutan bakal calon dan wakil

⁵Kaswan Try Poetra, "Perbandingan Rekrutmen PDI-Perjuangan dan Partai Demokrat Terhadap Caleg DPRD Pemilu Tahun 2014 di Kabupaten Polewali Mandar" (Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Politik dan Pemerintahan Universitas Hasanuddin Makassar, 2013), (Kamis, 6 April 2017, 20.12)

